

**ANALISIS KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK PUSAT KAJIAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN
PADA ANAK DI KOTA MEDAN**

Deni Endrayani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
deniendrayani95@gmail.com

Nursapia Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
nursapia@uinsu.ac.id

Elvi Yanti Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
elfiyanti@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini fokus pada analisis komunikasi kebijakan yang diimplementasikan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Medan dalam upaya pencegahan kejahatan terhadap anak. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di Indonesia, dengan kejahatan seksual mendominasi sebagian besar insiden. Sebagai respons terhadap situasi darurat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi anak, namun tantangan masih tetap ada, termasuk persepsi masyarakat yang toleran terhadap kekerasan dan hambatan dalam mengawasi interaksi anak di dunia digital. Studi ini mengkaji bagaimana PKPA Medan menggunakan berbagai platform media untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas strategi komunikasi yang digunakan PKPA dan memberikan rekomendasi bagi lembaga serupa dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan komunikasi yang efektif. Metode yang digunakan meliputi analisis konten dari kampanye komunikasi PKPA dan wawancara dengan stakeholder utama. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan respons terhadap perlindungan anak, serta menginformasikan pembentukan kebijakan dan praktik terbaik dalam pencegahan kejahatan pada anak di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan anak, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Komunikasi kebijakan, Edukasi publik, Strategi komunikasi.

Abstract

This research focuses on analyzing the policy communication implemented by the Child Study and Protection Center (PKPA) in Medan in an effort to prevent crimes against children. Data shows a significant increase in cases of physical and sexual violence against children in Indonesia, with sexual crimes dominating the majority of incidents. In response to this emergency situation, the Indonesian government has passed stricter laws to protect children, but challenges still remain, including society's tolerant perception of violence and barriers to monitoring children's interactions in the digital world. This study examines how PKPA Medan uses various media platforms to disseminate information and educate the public on the importance of protecting children from violence and exploitation. This study aims to understand the effectiveness of the communication strategies used by PKPA and provide recommendations for similar organizations in developing and implementing effective communication policies. The methods used include content analysis of PKPA's communication campaigns and interviews with key stakeholders. The results of the study are expected to increase awareness and response to child protection, as well as

inform policy formation and best practices in child crime prevention in Indonesia.

Keywords: Child abuse, Center for Child Study and Protection (PKPA), Policy communication, Public education, Communication strategy.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Meningkatnya kekerasan pada anak menunjukkan bahwa Indonesia ialah negara rawan kekerasan darurat terhadap anak. Setiap tahun, jumlah aksi kekerasan pada anak meningkat. Menurut statistik KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), ada 21.869.797 insiden pelanggaran hak anak antara tahun 2010 dan 2014, dimana tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten juga kota. Kejahatan seksual terhadap anak mencakup 42-58 persen pelanggaran hak anak; sisanya ialah insiden penyerangan fisik dan penelantaran.

Setiap tahun, jumlah korban dan data pelanggaran seksual pada anak di bawah umur meningkat secara signifikan. Di 2010, ada 2.046 kasus, 42% ialah pelanggaran seksual. Di 2011, terdapat 2.426 kasus, dengan pelanggaran seksual mencapai 58% dari total. Di 2012, ada 2.637 kasus, 62% ialah pelanggaran seksual. Di 2013 adanyakenaikan signifikan sebanyak 3.339 kasus, 62% ialah pelanggaran seksual, namun 2014 (Januari-April), terdapat 600 kasus yang melibatkan 876 korban, termasuk 137 kasus yang sebagian besar melibatkan anak.¹ Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, temuan beberapa penelitian dan statistik kekerasan terhadap anak di Indonesia masih cukup tinggi.

Penelitian yang dihimpun Komnas Perlindungan Anak juga menunjukkan perkembangan tindak kekerasan, terkhusus bullying di kalangan anak di bawah umur. Menurut laporan kasus dimana diberikan kepada Komnas pada November 2009, ada 98 kasus fisik, 108 kasus seksual, serta 176 kasus psikologis yang ditujukan anak di bawah umur. Tak berlebihan Seto Mulyadi mengatakan bahwa bullying telah menjadi sumber kekhawatiran anak muda.²

Lebih khusus lagi, Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan lingkungan rumah harus merupakan tempat aman. Kasus kekerasan terhadap anak tersebar luas dan melampaui batas-batas politik. Menurut Hyman & Snook (1999), lebih dari separuh anak pernah mengalami kekerasan fisik atau mental. Disiplin, memukul, menyerang secara verbal, melakukan razia, dan menghukum tindakan kekerasan serupa merupakan perlakuan. Seluruh kegiatan itu bukan cuma merugikan secara emosional serta fisik, tetapi merugikan

¹ Yayasan Semai Jiwa Amami, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), Hal. 65

² Ipah Saripah, *Permasalahan Anak dan Remaja serta Solusinya*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), Hal. 34

lembaga pendidikan dituju.³

Oleh karena itu, tidak heran jika Presiden atas desakan berbagai pihak mengeluarkan UU No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dimana menjatuhkan sanksi serta hukuman berat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, juga jenis hukuman tambahan seperti pengumuman publik.⁴

Tindakan kekerasan dapat mengambil banyak bentuk serta dapat dilaksanakan oleh berbagai individu. Umumnya, tindakan kekerasan yang normal bisa dibagi jadi tiga kategori: kekerasan verbal, kekerasan fisik, serta pelecehan emosional (penganiayaan psikologis). Variabel internal dan eksternal mempengaruhi ketiga bentuk kekerasan tersebut. Variabel internal, yaitu ciri khas anak. Variabel eksternal meliputi (1) dampak media, (2) gaya pengasuhan orang tua, (3) karakter teman sebaya, serta (4) tekanan lingkungan.

Kekerasan pada anak ialah semua jenis kekerasan fisik atau mental dimana diperbuat oleh orang tua, pengasuh, maupun orang lain di sekitar mereka, termasuk pelecehan, penelantaran, eksploitasi, ancaman, dan perilaku negatif lainnya yang memiliki konsekuensi fisik atau emosional pada anak. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku kekerasan sangat lazim di seluruh dunia, meskipun bentuk dan efeknya tidak diketahui secara luas. Selama ini, frase perpeloncoan, intimidasi, pemerasan, intimidasi, dan intimidasi telah digunakan secara bergantian. Penindasan menyumbang sebagian besar kasus.

Komunikasi kebijakan ialah penyebaran kebijakan, inisiatif, serta gagasan pemerintah terhadap masyarakat umum untuk meraih maksud negara.⁵ Dalam situasi ini, pemerintah mungkin dianggap sebagai komunikator serta masyarakat sebagai komunikan, tapisaatkondisikhusus, masyarakat dapat mengungkapkan ide dan gagasannya dan pemerintah dapat memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam lingkungan seperti itu, pemerintah punya kemampuan dan kewajiban untuk mengevaluasi, dan bahkan menindaklanjuti, permintaan-permintaan ini dalam batas-batas undang-undang serta peraturan dimana berlaku. Hingga pada akhirnya bisa melahirkan program pemerintah yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat.

PKPA di Jl. Abdul Hakim No. 5A Psr I Setia Budi Medan merupakan salah satu lembaga aktif memakai kegiatan komunikasi sebagai metode komunikasi serta memberikan berbagai informasi dalam rangka pembelaan anak. PKPA didedikasikan untuk mengadvokasi, mendidik, dan melindungi anak dalam berbagai situasi sulit, termasuk anak jalanan, anak miskin perkotaan,

³ Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Devi Manoharmayum, D., Habib Shah, A., Alekseevna Prodanova, N., Elmirzayevich Mamarajabov, M., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>

⁴ Rambe,R.F. AL. K., Ritonga, A.R., Dalimunthe,M.A. (2023). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 tahun 2014. *Komunika*. 19(01), 39-44. <https://doi.org/10.32734/komunika.v19i01.11411>

⁵ Hasan Erliana, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 35

pekerja anak, korban perdagangan, eksploitasi seksual anak, anak berkonflik dengan hukum, serta anak terpapar pada kekerasan dilakukan sendiri.

Menurut Pusat Kajian serta Perlindungan Anak, kekerasan fisik dan seksual pada anak terus meningkat, seperti dilansir Metro Siantar pada 24 Juli 2017. Bapak Misran Lubis, Senior Officer Pusat Kajian serta Perlindungan Anak, mengatakan pada tahun 2016, data dari jaringan perlindungan anak Sumut mengungkapkan 196 kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Serangan seksual ialah masalah yang paling umum, terhitung 75 kasus. Anak merupakan mayoritas korban, dengan 69 perempuan serta 6 laki-laki. Kedua ialah anak pelaku tindak pidana, dengan 53 kejadian dimana mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Kekerasan fisik menduduki peringkat ketiga dengan 43 kasus, dengan 31 laki-laki dan 12 perempuan sebagai korban.⁶

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, peneliti berpendapat penting untuk memahami dan menyelidiki analisis komunikasi kebijakan yang digunakan oleh Pusat Perlindungan dan Pengkajian Anak dalam pencegahan kejahatan pada anak di Medan. Sebab itu peneliti menganggap cukup penting guna melaksanakan penelitian dimana terkait dengan “Analisis Komunikasi Kebijakan Melalui Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan Pada Anak Di Kota Medan”. Kajian ini diperlukan karena bertujuan guna menjadi standar bagi penyebaran model komunikasi di lembaga-lembaga yang menerima pengaduan tindak pidana anak di masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi dan memahami makna dibalik peristiwa tersebut. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis sebuah data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis dan lisan dari pelaku dalam penelitian yang sedang diamati sebagaimana adanya dan tidak merubah bentuk, simbol, bilangan dan analisisnya dilaksanakan secara kualitatif.⁷ Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada perorangan, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam suatu peristiwa.⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai setting, sumber, dan metode. Namun, dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk

⁶ Metro Siantar, Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut, <http://www.metroSiantar.com/news/sumut/2017/07/24/260374/orangtua-pelaku-kekerasan-pada-anak-terbanyak-di-sumut/>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2020.

⁷ Sani, R. A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Kenana.

⁸ Rahadjo Mudjia, (2017), *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya*, Malang: Maulana Malik Ibrahim.

memastikan kebenaran serta validitas informasi yang diperoleh dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan untuk menguji data yang diperoleh langsung dilapangan. Uji keabsahan data dilaksanakan melalui tahapan kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.¹⁰ Sementara itu, analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Komunikasi Kebijakan Publik Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan pada anak di Kota Medan

Perencanaan komunikasi merupakan suatu pedoman komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan suatu program.¹¹ Hal ini perlu dilakukan karena berbagai kondisi realita, baik implisit maupun eksplisit, terus mengalami sebuah perubahan yang sangat dinamis. Sehingga perlu mencari elemen-elemen pokok untuk merumuskan perencanaan komunikasi sebagai landasan untuk melaksanakan suatu program.¹² Dalam hal ini, terdapat beberapa defenisi tentang perencanaan komunikasi, diantaranya:

1. Perencanaan komunikasi adalah proses mengalokasikan sumberdaya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya yang dimaksud bukan saja mencakup media massa dan komunikasi antara pribadi dan menciptakan keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dan ruang lingkup tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh sebuah organisasi.
2. Perencanaan komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan berkesinambungan dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan-kebijakan komunikasi.
3. Perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, sehingga peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program-program itu.

⁹ Satori, D & Komariah, A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

¹⁰ Sugiyono, (2017), *Metodo Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

¹¹ Ritonga, A.R. (2022). Pengaruh Iklim Komunikasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. *Komunika* 18 (2), 1-8.

¹² Oktapiani, M. (2019). Perencanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di indonesia. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 71-102.

Berdasarkan uraian diatas dari staff kantor pusat kajian dan perlindungan anak Kota Medan terkait dengan perencanaan komunikasi kebijakan publik dalam mencegah tindak kejahatan pada anak bahwa proses alur koordinasi dalam penyusunan melibatkan seluruh staff dan unit di pusat kajian dan perlindungan anak, “jadi penyusunan rancangan alur komunikasi dalam pengambilan kebijakan terkait pencegahan tindak kejahatan pada anak, kami menggunakan jalur top down dan buttom down proses perencanaan dilakukan dengan matang dan sebaik-sebaiknya, proses verifikasi data kami lakukan secara bertahap dan secara menyeluruh dari semua unit. Ya, memang seperti itu, supaya semua unit bisa saling mengingatkan dan membantu agar program tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin”

Untuk mencapai hasil yang tepat dan efisien dalam melaksanakan suatu program, diperlukan perencanaan komunikasi yang tepat. Ada banyak model yang digunakan dalam studi perencanaan komunikasi mulai dari model yang sederhana dan sampai kepada model yang cukup rumit. Namun perlu ditegaskan penggunaan suatu model dan tahapan perencanaan komunikasi tergantung pada sifat atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan tidak ada model yang dapat digunakan secara universal, melainkan sesuai kondisi dan realitas yang ada. Hal ini juga diakui tidak ada satupun model perencanaan komunikasi yang bisa diterima secara umum melainkan bisa dilakukan modifikasi sesuai dengan tujuan yang dicapai.¹³

Oleh karena itu, proses perencanaan terkait mencegah tindak kejahatan pada anak yang menjadi program pusat kajian dan perlindungan anak dengan model buttom up mulai dirancang sesuai proses Rapat Koordinasi dengan seluruh staff dan unit, sehingga hasil rapat akan melaksanakan sebuah program yang akan dilakukan agar kasus kejahatan pada anak dapat dikendalikan.

Media yang pakai oleh Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan pada Anak Di Kota Medan

Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, meyebar dan menyampaikan informasi. Penggunaan media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan baik bagi masyarakat, organisasi, lembaga ataupun instansi. Salah satunya lembaga yang memanfaatkan penggunaan media ialah PKPA dalam melakukan pencehagahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan.

Media yang digunakan PKPA berdasarkan wawancara dengan ibu Ayu Lestari menjelaskan bahwa PKPA menggunakan media website, facebook, instagram, dan youtube namun yang lebih sering digunakan website dan facebook. PKPA juga memiliki mediapatner yang online seperti ceritamedan.com, kabarmedan.com dan waspada online.

¹³ Ritonga, Z. (2020). Buku ajar manajemen strategi (teori dan aplikasi). Deepublish.

Selain penggunaan media yang telah disebutkan oleh bu Ayu Lestari, dan menambahkan bahwa saat ini media komunikasi yang digunakan oleh PKPA sebagai media internal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para staf PKPA adalah whatsapp group. Whatsapp group ini dipakai oleh seluruh anggota staf PKPA untuk membahas tentang program, perkembangan program dan lain sebagainya. Selanjutnya media yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke publik yaitu: media facebook, instagram, twitter, youtube.¹⁴ Adapun media eksternal, PKPA sering muncul itu ada di kabarmedan.com, ceritamedan.com, waspada online, analisa online dan tribun online namun ada juga tetap yang versi cetaknya, seperti di kompas yang hanya sesekali, ada juga di analisa, waspada dan tribun.¹⁵

Penggunaan media komunikasi PKPA secara online seperti website dapat diakses pada halaman www.pkpa-indonesia.org, halaman website memuat segala informasi PKPA baik dari profil lembaga, program kerja, aktivitas PKPA hingga berita yang dimuat oleh PKPA. Selain itu terdapat juga media facebook berupa halaman fanspage yang dapat diakses pada <http://www.facebook.com/pkpaindonesia/>, penggunaan mediafanspagefacebook sendiri adalah untuk mengunggah segala bentuk kegiatan dan juga isu-isu terkini tentang anak yang langsung dapat diberitakan secara online. Selanjutnya terdapat media youtube, media youtube digunakan untuk membagikan video-video report, video pembelajaran dan aktivitas-aktivitas secara audiovisual yang dapat diakses pada halaman <http://www.youtube.com/user/sulaimanmanik/>. Selanjutnya terdapat media instagram yang digunakan untuk memposting gambar aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh PKPA yang dapat dilihat pada alamat akun <http://www.instagram.com/yayasanpkpa/>. Dari beberapa media diatas rutinitas penggunaan yang sering digunakan oleh PKPA ialah media website dan facebook, di mana bahwa baik halaman facebook atau youtube terhubung secara otomatis ke halaman website.

Sejalan dengan penjelasan dari Ibu Ayu Lestari menjelaskan dan menambahkan bahwa PKPA menggunakan beberapa media komunikasi yaitu media cetak berupa surat kabar. Surat kabar ini sebenarnya kerja sama dengan media partner, di mana staf media PKPA nantinya mengirimkan press release ke media partner lalu diseleksi dan dimuat dijadikan berita. Press release yang dikirimkan oleh PKPA tidak memiliki keterikatan waktu, PKPA akan mengirimkan press release bisa saja hampir setiap hari dan bisa juga pada acara tertentu yang tetap terkait tentang isu anak, namun apakah press release itu nantinya menjadi sebuah berita yang dimuat oleh surat kabar adalah keputusan dari partner media. Selain itu ada juga media partner televisi dan radio, PKPA bahkan memiliki MOU kerja sama dengan beberapa media tersebut. Selain itu media cetak PKPA

¹⁴ Juanda, H. (2017). Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 1(1).

¹⁵ Zubaidah, D. S. (2018). Media komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

juga ada mengeluarkan buletin per empat bulan sekali ini di produksi oleh PKPA sendiri dan ada lagi contoh dari media cetak yang dibuat sendiri oleh PKPA seperti brosur, flyer, spanduk dan banner yang didesain sendiri oleh staf PKPA.

Penggunaan media cetak berupa surat kabar yang diproduksi melalui kerja sama dengan media patner seperti Sumut Pos, Medan Bisnis, Analisa, Waspada dan Tribun, tidak dilakukan dengan keterikatan waktu dalam penerbitan sebuah berita yang melibatkan PKPA. Umumnya PKPA akan mengirimkan press releaseke beberapa media surat kabar. Nantinya press release tersebut akan diseleksi apakah jika dianggap layak dimuat dalam surat kabar. Seperti press release yang dikirimkan PKPA ke medi patner surat kabar Waspada, press release tersebut dinaikan menjadi berita pada tanggal 15 Desember 2017dengan judul “PARFISumut Dukung Industri Kreativitas Film Generasi Now”. Selain itu terdapat media cetak lainnya yaitu buletin yang diterbitkan oleh PKPA perempat bulan sekali. Buletin PKPA memuat karya-karya anak yang ditangani oleh PKPA di sanggar kreatifitas anak. selain itu terdapat juga media campaign, pembuatan media campaign oleh PKPA sendiri tidak terjadwal. Media campaign seperti flyer, brosur, poster dan juga banner didesain sendiri oleh staf media dan publikasi. Pembuatan media campaign sendiri tidak terjadwal namun setiap terdapat acara atau kegiatan tentang anak oleh PKPA maka dibuatlah dan dicetak media campaign tersebut

PKPA juga memiliki kerja sama yang terjalin dengan media massa televisiyaitu DAAITV. Tidak ada program khusus yang menayangkan atau melibatkan PKPA secara terus menerus. Program yang melibatkan PKPA di dalamnya ialah program talk show, seperti program bingkai Sumatera yang ditayangkan oleh DAAITV pada tanggal 16 januari 2017 yang melibatkan PKPA didalamnya, tayangan tersebut memuat informasi sosialisasi tentang perlindungan hak-hak anak pada forum diskusi yang diinisiasi oleh PKPA.

Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Publik Yang dilakukan di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan pada Anak Di Kota Medan.

Secara sederhana, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Nurdin Usman mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.”¹⁶ Wahab mendefenisikan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁷

¹⁶ Fatimah, F. (2021). Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1).

¹⁷ Sadiyah, S., Maya, R., & Wahidin, U. (2018). Implementasi model pembelajaran dalam pemberantasan buta huruf Alquran di majelis taklim Nurul Hikmah Kampung Situ Uncal Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1-18.

Dunn menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implemementasi dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik” menurutnya implementasi kebijakan (policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.¹⁸

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada sebuah aktivitas, adanya aksi, sebuah tindakan atau mekanisme suatu sistem, ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas belaka, tetapi suatu kegiatan yang terstruktur dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

Winarno mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang ingin dicapai. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legalitas hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur yang diharapkan dapat bekerja sama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, diperlukan sebuah komunikasi yang efektif dan efisien agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik. Komunikasi adalah suatu hal yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan manusia. Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia ialah komunikasi yang memberikan sebuah kode atau simbol yang bermakna sebuah pesan searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seorang kelompok (sekelompok orang) secara langsung (secara tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio atau televisi. Jadi, komunikasi dianggap suatu proses linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada penerima, sasaran atau tujuannya.²⁰

Dalam konteks implementasi peranan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Kota Medan, komunikasi dibangun secara berjaring dengan melibatkan unsur-unsur lain selain dari lembaga pusat kajian dan perlindungan anak Kota Medan sendiri. Unsur yang terlibat yaitu

¹⁸ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), Hal. 132

¹⁹ Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Medan: Media Pressindo, 2006), Hal. 101

²⁰ Indainanto, Y. I., Dalimunthe, M. A., Sazali, H., Rubino, & Kholil, S. (2023). Islamic Communication in Voicing Religious Moderation as an Effort to Prevent Conflicts of Differences in Beliefs. *Pharos Journal of Theology*, 104(4). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.415>

Masyarakat dan tentu juga pemerintah. Sehingga implementasi akan tercapai secara efisien dan efektif.

Proses implementasi komunikasi kebijakan publik terkait dengan pelaksanaan pencegahan tindak kejahatan pada anak di Kota Medan yang diinisiasi oleh Pusat kajian dan Perlindungan Anak tentu melalui begitu banyak mekanisme, utamanya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak melakukan sebuah sosialisasi dimana dalam agenda atau kegiatan itu, berisi bagaimana sikap seseorang ketika ada sebuah kasus kekerasan pada anak baik sebelum dan sesudah terjadi harus dilakukan. Kemudian, masyarakat diberikan edukasi terkait pencegahan tindak kejahatan pada anak, dan bagaimana alur atau pelaporan yang harus dilakukan. Dan juga, bagaimana dengan kasus anak yang sudah dilecehkan atau menjadi korban.

Keterlibatan unsur-unsur dari tingkatan paling bawah yaitu masyarakat sangat diperlukan kontribusinya sehingga tentu dampak yang sangat signifikan terus mengalami kemajuan dalam mengidentifikasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. sehingga hal ini mendukung agar terus diberdayakan, agar kasus yang sangat mengganggu generasi penerus ini akan pudar dan musnah.

Hambatan yang terjadi saat komunikadi kebijakan public dilaksanakan di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan pada Anak Di Kota Medan

Dalam kajian komunikasi, tidak bisa dipungkiri sebuah komunikasi tentu memiliki sebuah hambatan dalam penyampaian pesan dan informasinya.²¹ Karena, pada dasarnya komunikasi ialah suatu proses penyampaian suatu informasi, baik berupa ide, gagasan dan simbol serta lambang-lambang yang akan disampaikan dari komunikator menuju ke komunikan hingga efek atau respon apa yang ditimbulkan.²² Keberhasilan dalam menyampaikan pesan yakni berupa gagasan dan ide tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat atau hambatan yang terjadi sehingga hambatan ini memungkinkan pesan yang akan disampaikan mengalami sebuah kendala hingga sampai kepada masyarakat.²³

Komunikasi pada intinya merupakan suatu proses penyampaian suatu informasi, baik ide-ide, gagasan dan lainnya, yang ditujukan kepada orang lain. Namun, dalam membangun komunikasi, tidak bisa dipungkiri akan mengalami berbagai macam hambatan-hambatan.²⁴ Karena

²¹ Prasanti, D. (2017). Potret Media Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Urban di Era Digital. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 19(2), 149-162.

²² Syatriadin, S. (2021). Pengaruh Percaya Diri Siswa dan Kemampuan Komunikasi Terhadap Pembelajaran di Sekolah MI An-Nisa. *AL-FURQAN*, 9(2), 19-32.

²³ Ritonga, A.R., Frimansyah., Zein, A., Syam, A.M., Ohorella, N.R. (2024). Misconceptions of Jihad: A Constructivist Review of the Meaning of Struggle in Islam in the Modern Era: Analysis of the verses al-Amwaal wa al-Nafs. *Pharos Journal of Theology*. 105(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1053>

²⁴ Sari, A. A. (2017). Komunikasi antarpribadi. Deepublish.

pada dasarnya, komunikasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya/ terdapatnya suatu hambatan yang terjadi pada semua sub sistem atau unsur-unsur yang mendukungnya. Hambatan komunikasi terjadi apabila terdapat intervensi yang mengganggu salah satu unsur, sehingga proses komunikasi tidak berjalan efektif.

Kendala dalam berkomunikasi dapat mempengaruhi proses komunikasi. Karena luasnya pengertian pesan yang disampaikan, sehingga dapat menimbulkan efek dan tindakan yang berbeda. Komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada persamaan makna antar komunikator dengan komunikan mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan antara komunikator dengan komunikan dapat dikatakan komunikatif jika kedua-duanya dapat mengerti bahasa yang dipergunakan dan paham makna yang disampaikan. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.²⁵ Hambatan secara internal yaitu tentu terjadi di dalam Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan sendiri terkait tentang koordinasi sesama Unit untuk saling mendukung dan membantu dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan pada anak sendiri. Sedangkan faktor eksternal tentu faktor diluar dari faktor eksternal.

Kreitner dalam Ruslan menerangkan empat macam hambatan yang dapat mengganggu dalam sistem sebuah komunikasi, yakni:

1. Hambatan dalam proses penyampaian

Hambatan ini datang dari pihak komunikator (sender barierr) yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesannya, tidak menguasai pesan dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hambatan ini juga berasal dari penerima pesan tersebut (receiver barierr) karena sulitnya komunikan dalam memahami pesan itu dengan baik. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual, dan sebagainya yang pula didiri komunikan. Kegagalan komunikasi dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor.²⁶ Feed-backnya (hasil tidak tercapai), medium barierr (media atau alat dipergunakan kurang tepat) dan decoding barierr (hambatan untuk memahami pesan secara tepat).²⁷

²⁵ Jamaluddin, D., Ratnasih, T., Gunawan, H., & Paujiah, E. (2020). Pembelajaran daring masa pandemik Covid-19 pada calon guru: hambatan, solusi dan proyeksi. LP2M.

²⁶ Irwan., Desnelita, Y., Susanti, W., Rizal, F., & Ritonga, A. R. (2023). The Implementation of Collaborative Project Based Learning Model with Inquiry Process using E-Learning in Higher Education. *Educational Administration Theory and Practice*, 29(1), 90–101. Available at: 10.48047/rigeo.11.09.187

²⁷ Ritonga, A.R., Dalimunthe, M.A., Veronica, A., Ginting, & L. D. C. U (2023). The Effectiveness of Social Media As A Promotional Medium Of The University Of Sumatera Utara (USU) Library. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 6 (3), 16-20

2. Hambatan fisik

Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang ingin dibangun. Misalnya, pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem atau gangguan pada penguat suara (sound system) yang sering terjadi pada suatu ruangan kuliah/seminar/pertemuan, dan lain-lain. Hal yang dapat membuat pesan-pesan tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikan.

3. Hambatan Simantik

Hambatan segi semantik (perkataan) yaitu adanya perbedaan pengertian antara pemberi pesan dengan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Mungkin saja bahasa yang disampaikan terlalu teknis atau formal, sehingga menyulitkan komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang, atau sebaliknya tingkat pengetahuan dan bahasa teknis komunikator yang kurang.

4. Hambatan psiko-sosial (psycososial barrier)

Adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek budaya, adat istiadat, kebiasaan, persepsi dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan serta harapan-harapan kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda.²⁸ Misalnya, komunikator atau pembicara menyampaikan kata “Tank” yang dalam bahasa Indonesia dimana artinya senjata perang namun bisa berbeda ketika didengar oleh orang yang mendengar. Boleh jadi didengarnya adalah “Tang” yang berarti alat atau perkakas kerja pada proyek proverti.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi yang efektif adalah pemahaman, pengaruh pada sikap, kesenangan, tindakan dan hubungan yang makin membaik.²⁹ Pelaksanaan pencegahan tindak kejahatan pada anak juga memiliki banyak hambatan, Ibu Dizza Siti Soraya menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan yang di hadapi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Stigma/ persepsi/ pemahaman masyarakat yang masih menganggap, bahwa menggunakan kekerasan sebagai hukuman terhadap anak adalah hal yang wajar. Penggunaan hukuman atau tindakan apabila si anak dalam melakukan kesalahan merupakan sebuah pemikiran yang salah terhadap apa yang ingin dicapai. Mengingat saat ini dan saat dahulu cukup berbeda. Tindak kekerasan yang terjadi sebagai hukuman memiliki dampak yang cukup panjang dalam perkembangan di dunia anak sendiri. Oleh

²⁸ Dalimunthe, M.A. (2022). Keterampilan Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Malaysia di Kota Medan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 1 (2), 82-89.

²⁹ Mailin, M., Dalimunthe, M.A. & Zein, A. (2023). Exploring Intercultural Communication in Indonesia: Cultural Values, Challenges, and Strategies. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33, 2804-2816.

karena itu, hendaknya pemikiran yang salah itu atau stigma serta persepsi masyarakat menjadi hambatan dalam pencegahan tindak kejahatan pada anak harus dirubah dengan memberikan sebuah hadiah atau apapun yang tidak berbentuk suatu kekerasan agar si anak tidak menjadi trauma.

2. Saat melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan di dunia digital ketidakmampuan orangtua dalam menggunakan gadget, menjadi hambatan tersendiri bagi orangtua untuk mengawasi aktivitas di dunia digital.³⁰ Ketika seseorang pemberi pesan yang bersifat secara digital memberikan sebuah informasi kepada si penerima pesan dimana pesan itu bersifat digital, hal yang harus dicermati oleh pemberi pesan yang bersifat digital itu ialah si penerima pesan digital itu mengerti isi pesan yang dimaksudkan. Namun, untuk tingkatan masyarakat memahami sebuah pesan yang disampaikan secara digital seperti halnya mengalami sebuah kendala. Tentu komunikasi yang seharusnya sampai kepada masyarakat dikarenakan pemahaman yang tidak sama akan mengalami yang namanya kendala dalam berkomunikasi. Hal ini tentu mempengaruhi sosialisasi yang dilakukan pihak pusat kajian dan perlindungan anak dalam mengedukasi masyarakat tadi. Dan juga dalam mengawasi anak-anak akan mengalami kesulitan dan menggunakan gadget apabila masyarakat kurang dalam pemahaman terkait dengan teknologi yang ada.
3. Sampai saat ini pemerintah cukup terbuka dalam menerima masukan dan berkegiatan bersama dengan PKPA. Akan tetapi dalam mengimplementasikan masukan-masukan yang diberikan oleh PKPA dan anak terkait kebijakan masih belum maksimal. Seringkali peserta didisposisi untuk mengikuti kegiatan bukanlah pengambil keputusan. Peran pemerintah tentu menjadi support system yang sangat efektif dalam pencegahan tindak kejahatan pada anak. karena itu, pemerintah yang tentu dalam hal ini dapat lebih efisien dalam pencegahan kasus kekerasan atau pelecehan seksual pada anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Kota Medan menerapkan perencanaan komunikasi kebijakan publik yang komprehensif untuk mencegah kejahatan terhadap anak, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Seluruh unit di PKPA Medan bekerja sama untuk mengimplementasikan perencanaan ini, yang mencakup strategi jangka pendek dan jangka panjang serta pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dan dari atas ke bawah (top-down), yang semua berorientasi pada kepentingan masyarakat. PKPA Medan menggunakan berbagai media komunikasi—baik cetak, elektronik, maupun online—untuk

³⁰ Sikumbang, A. T., Dalimunthe, M. A., Kholil, S., & Nasution, N. F. Digital *Da'wah* Indonesia *Ulema* in the Discourse of Theology. *Pharos Journal of Theology*. 105(1). 1-14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051>

menyebarkan pesan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi anak dan memenuhi hak-hak anak yang terabaikan. Media ini terbukti efektif dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak.³¹ Dalam hal regulasi, PKPA memiliki layanan Pengaduan Kasus yang langsung dirujuk ke Unit PUSPA (Pusat Pengaduan Anak), yang memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. PKPA juga menyediakan Mekanisme Umpan Balik melalui nomor layanan yang memungkinkan masyarakat melaporkan perlakuan salah oleh staf PKPA. Informasi tentang kedua layanan ini dipublikasikan melalui media sosial dan website PKPA serta diintegrasikan dalam semua kegiatan PKPA. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini, termasuk persepsi masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai hukuman yang wajar untuk anak, serta kesulitan orang tua dalam menggunakan teknologi digital yang menghambat pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital. Selain itu, meskipun pemerintah cukup terbuka dalam menerima masukan dan bekerja sama dengan PKPA, implementasi dari masukan tersebut masih belum maksimal, seringkali karena peserta yang diundang dalam kegiatan terkait bukanlah pengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2017). *Tesis Dinamika Kitab Kuning Dalam Kurikulum Al-Jami'yatul Washliyah Jalan Islamiyah Medan Tahun 1955-2015*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Dalimunthe, M.A. (2022). Keterampilan Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Malaysia di Kota Medan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 1 (2), 82-89
- Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Devi Manoharmayum, D., Habib Shah, A., Alekseevna Prodanova, N., Elmirzayevich Mamarajabov, M., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>
- Dunn. William N, 2014, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Erliana. Hasan, 2005, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Fatimah, F. (2021). Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1).
- Fauzan, I., Arifin, A., Dalimunthe, M. A., & Rahmadani, S. (2023). The configuration of ethnic and religious relations towards the 2024 general election: A case study in Medan, Indonesia. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(2), 2024006. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024006>
- Indainanto, Y. I., Dalimunthe, M. A., Sazali, H., Rubino, & Kholil, S. (2023). Islamic Communication in Voicing Religious Moderation as an Effort to Prevent Conflicts of

³¹ Rubino, R., Ritonga, A.R., Madya, E.B. & Ritonga, H.J. (2023). The Ethics of the Apostle Da'wah in the Qur'an and its Application in Social Media. *Pharos Journal of Theology*, 104(2). https://www.pharosjot.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_10_vol_104_2_indonesia_coirect.pdf

- Differences in Beliefs. *Pharos Journal of Theology*, 104(4).
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.415>
- Irwan., Desnelita, Y., Susanti, W., Rizal, F., & Ritonga, A. R. (2023). The Implementation of Collaborative Project Based Learning Model with Inquiry Process using E-Learning in Higher Education. *Educational Administration Theory and Practice*, 29(1), 90–101. Available at: 10.48047/rigeo.11.09.187
- Jamaluddin, D., Ratnasih, T., Gunawan, H., & Paujiah, E. (2020). Pembelajaran daring masa pandemik Covid-19 pada calon guru: hambatan, solusi dan proyeksi. LP2M.
- Juanda, H. (2017). Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1).
- Mailin, M., Dalimunthe, M.A. & Zein, A. (2023). Exploring Intercultural Communication in Indonesia: Cultural Values, Challenges, and Strategies. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33, 2804-2816.
- Metro Siantar, Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut, <http://www.metrosiantar.com/news/sumut/2017/07/24/260374/orangtua-pelaku-kekerasan-pada-anak-terbanyak-di-sumut/>.
- Oktapiani, M. (2019). Perencanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di indonesia. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 71-102.
- Prasanti, D. (2017). Potret Media Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Urban di Era Digital. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 19(2), 149-162.
- Rahadjo Mudjia, (2017), Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya, Malang: Maulana Malik Ibrahim.
- Rambe, R.F. AL. K., Ritonga, A.R., Dalimunthe, M.A. (2023). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 tahun 2014. *Komunika*. 19(01), 39-44. <https://doi.org/10.32734/komunika.v19i01.11411>
- Ritonga, A.R. (2022). Pengaruh Iklim Komunikasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. *Komunika* 18 (2), 1-8.
- Ritonga, A.R., Dalimunthe, M.A., Veronica, A., Ginting, & L. D. C. U (2023). The Effectiveness of Social Media As A Promotional Medium Of The University Of Sumatera Utara (USU) Library. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 6 (3), 16-20
- Ritonga, Z. (2020). *Buku ajar manajemen strategi (teori dan aplikasi)*. Deepublish.
- Ritonga, A.R., Frimansyah., Zein, A., Syam, A.M., Ohorella, N.R. (2024). Misconceptions of Jihad: A Constructivist Review of the Meaning of Struggle in Islam in the Modern Era: Analysis of the verses al-Amwaal wa al-Nafs. *Pharos Journal of Theology*. 105(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1053>
- Rubino, R., Ritonga, A.R., Madya, E.B. & Ritonga, H.J. (2023). The Ethics of the Apostle Da'wah in the Qur'an and its Application in Social Media. *Pharos Journal of Theology*, 104(2). https://www.pharosjot.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_10_vol_104_2_indonesia_correct.pdf
- Sadih, S., Maya, R., & Wahidin, U. (2018). Implementasi model pembelajaran dalam pemberantasan buta huruf Alquran di majelis taklim Nurul Hikmah Kampung Situ Uncal Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1-18.
- Sani, R. A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Kenana.

Deni Endrayani, Nursapia Harahap, Elvi Yanti Ritonga: Analisis Komunikasi Kebijakan Publik Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Tindak Kejahatan pada Anak di Kota Medan

Satori, D & Komariah, A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sari, A. A. (2017). *Komunikasi antarpribadi*. Deepublish.

Saripah. Ipah, 2010, *Permasalahan Anak dan Remaja serta Solusinya*, Jakarta: Alfabeta.

Sikumbang, A. T., Dalimunthe, M. A., Kholil, S., & Nasution, N. F. Digital *Da'wah* Indonesia *Ulema* in the Discourse of Theology. *Pharos Journal of Theology*. 105(1). 1-14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051>

Sugiyono, (2017), *Metodo Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

Syatriadin, S. (2021). Pengaruh Percaya Diri Siswa dan Kemampuan Komunikasi Terhadap Pembelajaran di Sekolah MI An-Nisa. *AL-FURQAN*, 9(2), 19-32.

Winarno, B. (2006). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.

Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo.

Zubaidah, D. S. (2018). *Media komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan)*.